

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun :

2 0 2 1



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 13

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post ✓	Tabengan	

# Ratusan Aset Milik Pemda Belum Disertifikasi

## PURUK CAHU, PPOST

Sampai saat ini masih ditemui pengelolaan aset yang belum tertib. Karenanya, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ambil bagian dan menyambut upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pemerintah daerah dalam pendataan aset dan sertifikasinya.

Hal ini disampaikan Kasatgas III Wilayah II Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Edi Suryanto, pada rapat koordinasi (rakor) percepatan sertifikasi dan pengamanan aset

pemerintah daerah (pemda) di ruang rapat Sekda Mura, Selasa (16/02).

"Semua aset yang free and clear disertifikatkan. Sedangkan untuk yang bersengketa, kita selesaikan kasus per kasus," katanya pada rakor yang diinisiasi KPK Satgas Pencegahan Direktorat III Wilayah 2 Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) itu dan digelar se-

cara daring.

Edi mengatakan, melalui fungsi koordinasi dan supervisi (Korsup) terus mendorong dilakukannya percepatan sertifikasi dan pengamanan aset milik pemda se-Kalteng.

Edi mengingatkan bahwa sesuai pasal 6 Undang-Undang UU Nomor 19 tahun 2019 tugas dan fungsi KPK

adalah pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan dan eksekusi.

Sementara itu, Sekda Murung Raya (Mura), Hermon menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan KPK dan BPN dalam percepatan sertifikasi dan pengamanan aset secara khusus di Mura yang hingga tahun 2020 masih ada 667 aset yang belum

disertifikasi.

Hermon berharap, dengan sinergisitas lintas sektor, penataan aset dan segala kendala dalam upaya percepatan ini dapat segera ketemu format dan penanganannya.

"Kami minta dari bidang aset segera melakukan koordinasi dengan pihak BPN. Apa yang kita telah dapatkan saat rakor ini akan kita rapatkan

lagi," ujar Sekda menutup pembicaraan.

Hadir dalam raakor tersebut, yakni Kadisperkimtan Markudius, Dani, Kadis Kominfo SP Bimo Santoso, Plt. Inspektur Rudy Roy, Pejabat dari BPN Mura dan Kasi Bagian Pemerintahan, Musgiyanta, serta pejabat dari bidang aset Dinas PPKAD. (trs/P4)